



## Dinamika Politik Gereja: Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menyikapi Isu-isu Kontemporer

**Yuliana Tammu<sup>a,1\*</sup>, Ribka Rua<sup>a,2</sup>, Yonita Sanda Limbu<sup>a,3</sup>, Putri Karua<sup>a,4</sup>**

<sup>a</sup> Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

<sup>1</sup> tammuyuliana@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

**Informasi artikel :**

*Received: 2 November 2024;*

*Revised: 15 November 2024;*

*Accepted: 25 November 2024.*

**Kata-kata kunci:**

Politik;

Gereja;

Pendidikan Agama Kristen.

**ABSTRAK**

Kehidupan umat Kristiani sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab baik dalam konteks gereja maupun sebagai warga negara. Menjalankan peran ini dalam hubungan gereja dan negara yang kompleks dan terus berkembang menghadirkan tantangan. Memahami prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai hubungan gereja dengan negara menjadi penting. Gereja, seperti garam dan terang (Matius 5:13,14), memiliki tugas, sikap, dan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan gereja tidak dapat dipisahkan dari negara/pemerintah, dan sebaliknya. Keduanya memiliki kuasa, fungsi, dan wilayahnya masing-masing. Posisi Gereja dalam politik telah kerap dibicarakan, namun ada yang belum memahami arti gereja dan politik. Mengamati situasi politik, orang percaya atau Gereja harus mengambil sikap. Pendidikan agama Kristen memiliki peran penting dalam membantu umat Kristiani memahami permasalahan politik dan memberikan bimbingan moral dalam mengambil sikap. Jika umat Kristiani memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika politik dan nilai-nilai Kekristenan, mereka dapat memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

**Keywords:**

Politics;

Church;

Christian Religious

Education.

**ABSTRACT**

*The Dynamics of Church Politics: The Role of Christian Religious Education in Addressing Contemporary Issues. The life of Christians as members of society is inseparable from their role in the nation and state. They have rights and responsibilities both within the church context and as citizens. Fulfilling this dual role within the complex and ever-evolving relationship between church and state poses significant challenges. Understanding biblical principles concerning the relationship between the church and the state is therefore essential. The church, as salt and light (Matthew 5:13-14), has duties, attitudes, and ministries in various aspects of life. This underscores that the existence of the church cannot be separated from the state/government, and vice versa. Both entities have their respective powers, functions, and spheres. The position of the church in politics has often been discussed, yet some still lack a clear understanding of the meaning of church and politics. In observing political situations, believers or the church must take a stance. Christian religious education plays a vital role in helping Christians understand political issues and providing moral guidance in making decisions. With a solid understanding of political dynamics and Christian values, Christians can make a positive impact in building a better society.*

**Copyright © 2024 (Yuliana Tammu, dkk). All Right Reserved**

How to Cite : Tammu, Y., Rua', R., Limbu', Y. S., & Karua, P. (2024). Dinamika Politik Gereja: Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Menyikapi Isu-isu Kontemporer. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(12), 488–494. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i12.2638>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright

## Pendahuluan

Sebagai anggota masyarakat, kehidupan umat Kristiani tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dalam negara dan berbangsa. Jika umat Kristiani memiliki hak dan tanggung jawab dalam konteks gereja, maka mereka juga memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, bagaimana umat Kristiani menjalankan peran mereka dalam situasi ini merupakan hal yang penting. Hubungan antara gereja dan negara bukanlah tanpa tantangan, bahkan hubungan ini telah terjalin sejak lama dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, penting bagi umat Kristiani untuk memahami prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai hubungan antara gereja atau umat Kristiani dengan negara atau pemerintah. Gereja pada dasarnya memahami bahwa kehadirannya di dunia ini seperti garam dan terang (Matius 5:13,14). Prinsip ini menjadi dasar bagi semua tugas, sikap, kegiatan, dan pelayanan gereja dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui contoh sikap Yesus Kristus dan para rasul terhadap pemerintahan pada masanya, kita dapat melihat bagaimana gereja menyesuaikan diri dengan situasi dan konteks yang berbeda-beda. Namun, prinsip garam dan terang tetap menjadi landasan teologis dalam memahami hubungan antara gereja atau umat Kristiani dengan negara atau pemerintah. Trilogi panggilan gereja, yaitu Marturia (Saksi), Koinonia (Kesatuan), dan Diakonia (Pelayanan), harus dilaksanakan dengan dasar teologis yang sesuai.

Gereja, dipanggil ke dalam dunia ini dengan memberikan ruang kepada gereja-gereja dengan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam masyarakat (Setiawan, 2023). Setiap warga gereja adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang yang dipanggil ke gereja juga diutus untuk berperan dalam masyarakat, maupun dalam negara serta ikut serta dalam membangun masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan gereja tidak dapat dipisahkan dari negara/pemerintah, demikian sebaliknya. Baik gereja dan pemerintah memiliki kuasa, fungsi dan wilayahnya masing-masing. Keberadaan gereja dan pemerintah (negara) sebagai dua otoritas tidak perlu lagi dipertentangkan (Luther, 1523).

Gereja, dalam konteks hubungannya dengan bangsa atau negara, tidak dapat dipisahkan dari politik. Posisi gereja dalam ranah politik telah menjadi topik diskusi yang sering muncul, meskipun tidak semua orang memahami secara mendalam makna gereja dan politik itu sendiri. Secara umum, gereja adalah kumpulan atau jemaat pilihan, yaitu mereka yang dipanggil Allah keluar dari dunia, pergi dari dosa dan masuk ke dalam wilayah anugerah (R.C., 2022). Gereja, dalam bahasa Yunani "*ekklesia*", yang berarti komunitas orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Yesus Kristus. Pemahaman yang multifaset tentang gereja ini menuntut pendekatan yang bernuansa dalam memahami keterlibatannya dalam politik. Mengingat misi gereja yang inheren untuk menyebarkan pesan kasih, keadilan, dan damai, gereja tidak dapat bersikap apatis terhadap lanskap politik. Sebagai komunitas orang percaya, gereja memiliki panggilan khusus untuk memperjuangkan hak-hak yang tertindas, kaum marginal, dan minoritas karena mengalami ketidakadilan sosial, politik, ekonomi sama seperti Yesus di zaman-Nya (Siburian, 2020). Hal ini mengharuskan gereja untuk melakukan pemeriksaan kritis terhadap sistem dan kebijakan politik, mengidentifikasi area di mana kebijakan tersebut selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani.

Dalam mengamati lanskap politik, orang percaya dan gereja harus mengambil sikap. Sikap ini bukan berarti terlibat dalam politik partisan atau mendukung partai politik tertentu. Sebaliknya, gereja harus mencermati implikasi etis dari tindakan dan kebijakan politik, berani berbicara kebenaran kepada kekuasaan, dan mempromosikan masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Suara gereja harus menjadi suara nubuat, menantang ketidakadilan dan mengadvokasi dunia yang mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Keterlibatan gereja dalam politik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang misi gereja dan kompleksitas ranah politik. Hal ini menuntut komitmen terhadap pengambilan keputusan etis, yang diinformasikan oleh prinsip-prinsip alkitabiah dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan semua orang. Dengan merangkul tanggung jawab ini, gereja dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan positif di dunia, berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan setara.

Dalam praktik politik gereja, tentunya tidak terlepas dari isu-isu kontemporer di jaman sekarang. Gerli Safira Petonengan, dalam tulisannya menjelaskan bahwa Gereja dan politik merupakan dua entitas yang saling berhubungan dalam masyarakat, tetapi sering kali terjadi konflik dan ketidaksepakatan antara keduanya. Permasalahan ini dapat dilihat dari sikap apolitis yang diambil oleh beberapa gereja di Indonesia, yang menyebabkan mereka tidak terlibat dalam partisipasi politik dan tidak memainkan peran yang seharusnya dalam membangun (Petonengan, 2024). Penelitian lain yang juga membahas keterkaitan gereja dan politik yang dilakukan oleh Adi Putra dkk yang menyoroti praktik politik di dalam gereja dan bagaimana gereja dapat melakukan transformasi politik secara positif, kritis, kreatif, dan realistis. Gereja dianggap sebagai garam dan terang dunia yang dapat melakukan perubahan politik melalui iman Kristiani (Putra, 2023). Oleh karena itu, agar lebih jelas hubungan gereja dan politik tersebut, dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana gereja, melalui Pendidikan agama Kristen perlu memberikan pemahaman kepada setiap warga gereja, sehingga dalam praktiknya, politik tidak dipandang sebagai sesuatu yang merugikan, sebaliknya akan dipandang sebagai bagian dari Kerjasama antara gereja dan negara untuk mensejahterakan masyarakat.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi Pustaka. Penulis menelusuri artikel, jurnal, buku, ensiklopedia, yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui penelusuran yang mendalam penulis mendapatkan pemahaman yang kompleks dan akurat serta relevan untuk menyelesaikan penulisan artikel ini. Langkah-langkah yang digunakan adalah mencari jenis Pustaka (buku, artikel, jurnal dll) yang dibutuhkan, menentukan jenis Pustaka yang digunakan, melakukan pengkajian terhadap artikel yang ditentukan, serta menyajikan hasil studi pustaka dalam artikel jurnal yang ditulis.

## Hasil dan Pembahasan

Politik berasal dari bahasa Yunani Polis. Secara Harafiah arti kata polis adalah kota, dan dari sinulah kemudian dikembangkan berbagai pengertian. Pembagian yang dilakukan ahli terhadap politik, yakni politik sebagai ilmu (*political science*) dan politik filsafat (*political Philosophy*). Memang melahirkan pengertian yang berbeda, terutama pada objek dan persoalan-persoalan utamanya. Science dan philosophy keduanya tetap berangkat berhubungan teori dan seni dari pemerintahan sipil, karena itu sangat sulit untuk memisahkannya secara jelas, terutama untuk memahami pengertian yang lebih utuh. Istilah lain dalam Bahasa Yunani adalah politea yang berarti warga negara, negara dan kesejahteraan. Jadi politik adalah suatu masyarakat yang yang berdiam di suatu kota. Sesuai dengan perkembangannya, beberapa pakar memberikan penjelasan mengenai pengertian politik sesuai dengan kajian yang diberikan yaitu politik di persepsi sebagai kekuasaan negara, perilaku elit ekonomi, system, budaya, pembangunan, konflik antar kelas dalam masyarakat, ekonomi dan lain-lain.

Dalam politik demokrasi politik merupakan kekuasaan yang menduduki parlemen atau pemerintahan, sehingga politik diidentikkan dengan kekuasaan atau kedudukan (Gunche, 2009). Politik secara terminologis dapat diartikan: Pertama, menunjuk kepada “satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat”. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (*politics*). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik. Kedua, menunjuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (*policy*). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan. Ketiga, menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (*siyasa*).

Dalam buku manifesto politik Yesus, dijelaskan dengan mengacu pada pandangan kalvin bahwa jika gereja berpolitik berarti gereja menjalankan fungsinya di dunia ini sebagai hamba Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, baik secara rohani, jasmani, maupun materi". Dalam hal ini, gereja perlu menyadari bahwa kehadirannya adalah untuk membina rohani umatnya serta memiliki kedaulatan yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Negara tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan agama, namun jika dari segi sosial, negara berkewajiban untuk melindungi atau menata kehidupan umat beragama untuk mencapai keharmonisan tata sosial. Negara juga harus mewajibkan negaranya untuk memeluk salah satu agama yang telah diakui sehingga dengan sendirinya negara terlibat dalam menata ajaran mengenai Agama (Ihsan, 2009). Jadi gereja boleh berpolitik jika politik dipahami sebagai kemampuan hidup Bersama dalam polis.

Dalam berpolitik, gereja harus menjadi garam dan terang bagi masyarakat dimanapun gereja berada (Mat 5:13-16), dengan memberikan damai sejahtera melalui tindakannya sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan bahkan meladani. Gereja juga harus mampu menyelesaikan konflik dan bahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang mengakibatkan kerusakan. Sebagai terang gereja diutus untuk menerangi orang-orang yang berada dalam kegelapan, menerangi dunia, memberi harapan yang baru dan mengembalikan tujuan dunia diciptakan, yaitu untuk memuliakan Allah disetiap Tindakan terutama dalam hal berpolitik. Karena itu, hak politik harus di gunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat, dalam artian bahwa hak-hak umat dalam politik diperjuangkan (Chilton, 2004).

Kehadiran gereja dalam konteks politik sangatlah penting. Sebagai orang Kristen yang percaya, kita telah dipanggil dan diberikan tugas oleh Yesus Kristus untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kebiasaan untuk melihat politik dan peraturan yang ada di dalamnya sebagai bagian dari penghukuman dan anugerah Allah. Oleh karena itu, kita berpartisipasi dalam politik dengan kesadaran bahwa segala kuasa dan anugerah berasal dari Allah (Roma 13:4). Sebagai umat Kristen, kita aktif dalam politik sesuai dengan perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang, memperlihatkan kehendak Allah sebagai warga negara yang baik, dan menjaga hubungan yang harmonis antara umat beragama.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa terkadang gereja kehilangan ketajamannya dalam menghadapi berbagai masalah. Terjadi perpecahan dalam pemahaman dan sikap gereja terhadap persoalan-persoalan yang timbul, baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah (Naruru, 2020). Mungkin hal ini terjadi karena sejarah masa lalu di mana gereja sering kali menerima bantuan dari pemerintah. Meskipun bantuan tersebut adalah hal yang wajar sebagai mitra gereja, kita harus menyadari bahwa hal itu tidak boleh menghilangkan daya kritis atau memupuk budaya malu sehingga gereja tidak dapat bertindak. Sebagai gereja, kita berada di dunia ini untuk menerangi dunia, termasuk dalam politik, demi kesejahteraan umat. Tidak boleh kita terjebak dalam perjuangan kekuasaan, tetapi sebagai saluran kenabian, gereja harus terus menunjukkan eksistensinya (Hakh, 2008).

Orang-orang Kristen dan gereja-gereja harus aktif berpolitik. Yang dimaksudkan disini ialah bukan langsung berpolitik praktis, dalam arti menjadi anggota partai politik dan memperjuangkan aspirasi partai, melainkan menyoroti dunia politik Indonesia dan mengambil sikap politik (Rantung, 2017). Keterlibatan gereja dalam bidang politik tidaklah semata-mata keterlibatan politik praktis, tetapi terutama sebagai pertanggungjawaban selaku warga masyarakat yang diutus oleh Tuhan untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran serta kebaikan Allah di dunia. Gereja tidak boleh membiarkan kekuasaan duniawi berkembang ke arah yang cenderung deskruktif. Kepedulian dan keterlibatan itu bukan hanya untuk mengatasi masalah yang timbul, tetapi juga untuk mencegahnya. Gereja terpanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kancah dunia.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri menunjukkan cara berpolitik yang benar. Yesus mengajak para pengikutnya (orang-orang percaya) untuk membayar pajak. Dimana pajak merupakan penyokong keberlangsungan roda pemerintahan guna membangun suatu bangsa dan negara (Matius

22:21). Pesan Yesus tersebut mengajarkan supaya patuh dan mentaati keputusan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara dan mengenai Undang-Undang membayar pajak adalah tidak menyalahi, karena sasaran pajak jelas terurai dan dialamatkan. Dengan kata lain, pajak bukan merupakan income (pemasukan) yang memperkaya para pejabat negara, melainkan pajak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Redi, 2017).

Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh para pemuka agama untuk selain menyebarkan agama yang dianut juga mempertahankan kuantitas agama atau umat yang beragama. Oleh karena itu, merekapun mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang menurut mereka dianggap dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan pengetahuan di bidang agama mereka masing-masing. Ada pula yang mendefinisikan Pendidikan sebagai suatu usaha sadar untuk memanusiakan manusia serta membudayakan manusia di mana terjadi suatu proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, moral, social, sesuai dengan kemampuan dan martabatnya sebagai manusia. Pada hakekatnya Pendidikan mencakup interaksi manusiawi, membina dan mengembangkan potensi manusia, berlangsung sepanjang hayat, sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan individu, ada dalam keseimbangan antara kebebasan subjek didik dengan kewibawaan guru, dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Sudjana, 1989). Secara kodrati pula manusia diberi kemampuan berpikir sebagai penggerak untuk mau merubah, memperbaiki, memajukan serta meningkatkan taraf hidupnya dan semuanya itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Jadi Pendidikan adalah bagian integral dalam hidup manusia (Dewantara, 1997).

Pendidikan Agama Kristen adalah upaya atau sebuah proses yang mana di dalamnya kita banyak belajar tentang ajaran agama, secara khusus ajaran agama Kristen. Selain itu, dalam Pendidikan agama Kristen kita juga belajar tentang bagaimana kita berperilaku sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Martin Luther, mendefinisikan PAK sebagai Pendidikan yang melibatkan seluruh warga gereja untuk belajar, memperlengkapi mereka dengan sumber iman, secara khusus yang berkaitan dengan pengalaman berdoa, belajar Ikitab, dan rupa-rupa kebudayaan sehingga mereka mampu melayani sesama termasuk masyarakat dan mengambil bagian dengan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen (Robert, 2011). Belajar Pendidikan agama Kristen berarti belajar tentang keseluruhan aspek kehidupan, yang juga melibatkan komunitas dan interaksi social dengan orang lain dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan terlibat dalam masyarakat yang lebih luas. Begitu pentingnya Pendidikan agama Kristen, secara khusus dalam kehidupan umat Kristen. Dengan adanya Pendidikan Kristen, setiap orang akan berlaku sesuai dengan tuntutan yang ada.

Melalui Pendidikan agama Kristen Allah bekerja melalui hati orang yang diajar, untuk menjadikan orang tersebut menja di murid-murid yang terikat secara penuh kepada Injil Allah, dengan memahaminya serta dengan iman memungkinkan orang yang diajar untuk memberi kesaksian yang meyakinkan baik dengan kata maupun perbuatan di tengah-tengah dunia (Nuhamara, 1994). Secara umum tujuan dari Pendidikan agama Kristen adalah: Pertama, mengenal dan memahami Kristus: melalui Pendidikan agama Kristen, peserta didik dapat mengenal dan mengalami kehadiran Kristus dalam hidupnya. Melalui pengajaran, doa, dan aktivitas rohani, siswa diajak untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan Kristus, belajar tentang ajaranNya, dan mengalami kasihNya. Kedua, benar-benar mengasihi Tuhan: melalui Pendidikan Kristen, siswa mampu mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan (Bnd. 12:30). Mereka diajar untuk menghormati, menyembah dan memuliakan Tuhan dalam segala bidang kehidupannya. Ketiga, hidup dalam ketaatan: tujuan Pendidikan Kristen adalah mendidik setiap orang menjadi manusia yang hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan dan ajaranNya. Setiap orang diajar untuk mengikuti teladan Kristus dalam berperilaku, membuat keputusan yang bijak dan hidup dalam kebenaran dan kasih. Keempat, mengimplementasikan iman dalam kehidupan sehari-hari: Pendidikan agama Kristen bertujuan untuk membantu menerapkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang diajarkan untuk menghormati orang lain,

---

melayani orang lain dan menjadi berkat bagi dunia. Dari tujuan Pendidikan agama Kristen tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan agama Kristen adalah membentuk peserta didik yang beriman kuat, berakhlak mulia, dan berkepribadian yang berdampak positif terhadap keberlangsungan masyarakat.

Berbicara mengenai keterlibatan Kristen dalam politik, rupanya menyinggung pesan dalam kitab Kejadian 1:26-28, dimana Allah memberikan mandate kepada manusia untuk mengelola ciptaan. Begitu pula dalam pesan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma (Roma 13:1), yang menegaskan bahwa kekuasaan adalah milik dan pemberian Allah kepada manusia. Karena itulah disebutkan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk mengatur manusia kearah yang lebih baik. Walaupun pemerintah tidak sempurna, materi ajar memotivasi setiap orang untuk mendukung upaya pemerintah menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan agama Kristen dapat menjadi sarana bagi Pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi salah satu area yang perlu disentuh oleh Pendidikan agama Kristen dengan tujuan merubah pandangan orang Kristen yang belum paham tentang politik dan mengubah pandangan negative masyarakat menjadi positif tentang politik, secara khusus tentang isu-isu yang terjadi dalam dunia politik. Pendidikan agama Kristen memberikan pemahaman bahwa gereja tidak secara langsung terkait atau terlibat dalam politik. Gereja tidak boleh menjadi pendukung suatu partai politik termasuk partai politik Kristen. Dalam hal ini, melalui nilai-nilai Pendidikan agama Kristen, seperti: menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, komitmen, berani berkorban, menjunjung tinggi kesetaraan, cintai damai, anti kekerasan dan peduli lingkungan, warga gereja mempunyai kesadaran orientasi politik yang jelas, serta dapat berpartisipasi dengan benar dalam proses-proses dan perkembangan politik.

Pendekatan Pendidikan agama Kristen dalam menanggapi isu-isu politik, melalui nilai-nilai Kristiani dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, Mengajarkan prinsip-prinsip moral: Pendidikan agama Kristen dapat mengajarkan prinsip-prinsip moral berdasarkan ajaran Alkitab dan penjaran Yesus Kristus. Kita diajar untuk menghormati martabat manusia, keadilan, kebenaran, cinta perdamaian. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, setiap orang dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi permasalahan politik. Kedua, mendorong partisipasi aktif: Pendidikan agama Kristen juga dapat mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab, berpartisipasi dalam pemilu, dan mendorong pembangunan masyarakat yang adil. Ketiga, mengembangkan kesadaran social: Pendidikan agama Kristen dapat membantu mengembangkan kesadaran social yang lebih luas. Selain daripada itu, juga mengajarkan tentang kepedulian terhadap permasalahan social masyarakat seperti kemiskinan, kesenjangan, diskriminasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Keempat, Mendorong dialog dan toleransi: ajaran agama Kristen juga dapat mendorong dialog dan toleransi dalam menghadapi perbedaan politik. Melalui pendekatan ini, setiap orang diajar untuk menghargai pendapat dan keyakinan orang lain serta berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Dengan menggunakan beberapa pendekatan tersebut, Pendidikan agama Kristen dapat menyikapi isu-isu yang terjadi dalam dunia politik.

## Simpulan

Dinamika politik gereja memainkan peran penting dalam menyikapi isu-isu kontemporer, di mana pendidikan agama Kristen berfungsi sebagai landasan untuk membangun pemahaman dan kesadaran di kalangan umat. Melalui pendidikan agama, gereja dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang nilai-nilai Kristiani, mendorong kritik terhadap kebijakan yang tidak adil, serta mengembangkan sikap aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen tidak hanya membekali individu dengan pemahaman spiritual, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk terlibat secara konstruktif dalam diskursus politik dan sosial, sehingga gereja dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan positif dalam masyarakat.

## Referensi

- Chilton, B. (2004). *Studi Perjanjian Baru Bagi Pemula*. BPK Gunung Mulia.
- Dewantara, K. H. (1997). *Konsep Pendidikan Nasional*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Gunche, L. (2009). *Manifesto Politik Yesus*. ANDI.
- Hakh, S. B. (2008). *Pemberitaan Tentang Yesus Menurut Injil Sinoptik*. Jurnal Info Media.
- Ihsan, A. B. (2009). *Menyebarkan Toleransi Menyemai Harmoni: SBY dalam Wacana Perdamaian Moderatisme dan Keadilan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Luther, M. (1523). *Secular Authority: To What Extent It Should Be Obeyed*. Fortress Press.
- Naruru, R. F. (2020). *Gereja Sosial: Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas*. CV Budi Utama.
- Nuhamara, D. (1994). *Materi Pokok Pembimbing Pendidikan Agama Kristen Modul 1-9*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama dan Universitas Terbuka.
- Petonengan, G. S. dkk. (2024). Kajian Teologis Gereja Dan Politik: Analisis Transformasi Hubungan dan Keterlibatan Kontemporer. *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual, Vol 1 (1)*, 44.
- Putra, A. dkk. (2023). Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja. *Saint Paul's Review, Vol 3 (1)*, 78–92.
- R.C., S. (2022). *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen*. Departemen Literatur SAAT.
- Rantung, D. A. (2017). Pendidikan Agama Kristen Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen, Vol. 1, No, 7*.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Robert, B. R. (2011). *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek PAK*. BPK Gunung Mulia.
- Setiawan, J. (2023). Misi Gereja dalam Konteks Sosial Masyarakat. *Jurnal Teologi Kontekstual, Vol. 12 No, 45*.
- Siburian, T. (2020). Eklesiologi Profetik Pada Isu-Isu Etis Kerakyatan Kristen: Refleksi Injili. *Stulos: Jurnal Teologi, Vol 18(2)*, 191.
- Sudjana, N. (1989). *Cara Belajar Siswa Aktif, dalam Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru.